



## ***Politic Goes to School: Pendidikan Politik pada Siswa SMAN 1 Wonomulyo***

**Rezki Rahmawati<sup>1</sup>, Rahmatullah<sup>2</sup>, Andi Mappatunru<sup>3</sup>, Hendrawan<sup>4</sup>**

Universitas Sulawesi Barat, Majene

[rezki.rahmawati@unsulbar.ac.id](mailto:rezki.rahmawati@unsulbar.ac.id)<sup>1</sup>, [rahmatullah@unsulbar.ac.id](mailto:rahmatullah@unsulbar.ac.id)<sup>2</sup>,

[andimappatunru@unsulbar.ac.id](mailto:andimappatunru@unsulbar.ac.id)<sup>3</sup>, [hendrawan@unsulbar.ac.id](mailto:hendrawan@unsulbar.ac.id)<sup>4</sup>

### **Abstrak**

Pendidikan politik ialah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman ini perlu ditumbuh kembangkan pada setiap komponen bangsa terutama generasi muda. Pendidikan literasi politik yang dilakukan pada Siswa SMAN 1 Wonomulyo merupakan langkah awal untuk membantu menumbuhkan pemahaman politik yang benar. Hal ini dinilai akan berdampak positif bagi praktek politik yang akan dilakukan siswa dimasa depan. Adapun beberapa tahap yang dilakukan yaitu: 1) Pelaksanaan *Capacity Building* workshop literasi politik pada tanggal 1 Oktober 2022; 2) *Focus Group Discussion* (FGD) pada tanggal 7 November 2022; 3) *Sharing session* pendidikan politik pada tanggal 15 Desember 2022. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan metode luring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk memberikan pendidikan politik pada Siswa SMAN 1 Wonomulyo. Hasil dari pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam bentuk *workshop*, *focus group discussion* serta *sharing session* terkait politik ini dapat memberikan pemahaman awal kepada siswa terkait politik serta bagaimana melaksanakan praktek-praktek politik yang benar.

**Kata Kunci:** literasi politik, pendidikan politik, praktek politik

### **Abstract**

*Political education is a process of learning and understanding the rights, obligations, and responsibilities of every citizen in the life of the nation and state. This understanding needs to be developed in every component of the country, especially the younger generation. Political literacy education conducted for SMAN 1 Wonomulyo students is the first step to helping foster a correct political understanding. This is considered to have a positive impact on political practice that will be carried out by students in the future. The several stages carried out are 1) Implementation of a Capacity Building workshop on political literacy on October 1, 2022; 2) Focus Group Discussion (FGD) on 7 November 2022; 3) Political education sharing session on December 15, 2022. Activities are carried out offline while still paying attention to health protocols. This community service is carried out to provide political education to students of SMAN 1 Wonomulyo. The results of community service carried out in the form of workshops, focus group discussions, and sharing sessions related to politics can provide students with an initial understanding of politics and how to implement correct political practices.*

**Keywords:** *political literacy, political education, political practice*

## PENDAHULUAN

Politik merupakan sarana yang paling elegan dalam meraih atau mendapatkan kekuasaan. Kebijakan-kebijakan yang ada dalam suatu negara merupakan produk politik yang digunakan oleh sekelompok orang, dalam hal ini pemerintah untuk mempengaruhi atau merubah tatanan kehidupan masyarakat (Rahman, 2018). Masyarakat sebagai objek politik tentu saja harus memiliki pemahaman yang baik mengenai politik agar tidak terjebak pada hal-hal yang merugikan masyarakat itu sendiri. Kendati pemahaman terhadap politik merupakan sesuatu yang penting, bukanlah hal yang mudah untuk memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat. Layaknya pengetahuan-pengetahuan lainnya, pendidikan politik harus diberikan sedini mungkin melalui sarana pendidikan di lingkungan sekolah secara khusus.

Pendidikan politik sendiri adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Bab I Pasal 1 ayat 4). Pemahaman ini perlu ditumbuh kembangkan pada setiap komponen bangsa terutama generasi muda. Para ilmuwan politik dalam seminar LIPI (Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia) mengatakan bahwa *"Sebagian dari kemerosotan politik di Indonesia disebabkan oleh kegagalan partai-partai atau kaum sipil umumnya untuk merangsang proses kearah terwujudnya suatu sistem politik yang sehat sewaktu mereka mempunyai kesempatan untuk berbuat itu..."* (Halik, 2019).

Sejak dini generasi muda dalam hal ini siswa sekolah setingkat SMA harus peduli dengan persoalan bangsa khususnya masalah politik. Mereka perlu belajar sekaligus memahami berbagai persoalan yang sedang dihadapi bangsa dan negerinya. Masa remaja yang sedang dijalani siswa SMA merupakan periode penting karena akibatnya yang langsung berdampak terhadap sikap dan perilaku (Izzati, 2013). Pada usia remaja, seorang individu juga mulai menyerap berbagai informasi. Oleh karena itu, pada usia remaja siswa lebih mudah untuk diarahkan pada konsep-konsep positif yaitu konsep keilmuan. Konsep keilmuan yang diserap termasuk juga di dalamnya berbagai konsep politik. Hal ini menjadi penting agar siswa tidak buta terhadap politik dan hanya menjadi sasaran pembodohan politik, karena siswa yang dikatakan sebagai pemilih pemula memiliki kedudukan strategis dalam setiap pelaksanaan politik praktis yaitu pemilihan umum.

Pemilih pemula sendiri memiliki kedudukan strategis dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum karena secara kuantitatif jumlahnya relatif banyak (Setiajid, 2011). Pemilih pemula merupakan salah satu bagian pemilih yang memiliki pola perilaku sendiri dan sulit diatur atau diprediksi, kekhawatiran adanya kecenderungan untuk tidak memilih karena bingung banyaknya partai politik yang muncul yang pada akhirnya membuat pemilih pemula tidak memilih sama sekali.

Maka dari itu, pendidikan politik perlu diaplikasikan ke dalam lembaga pendidikan, namun bukanlah dalam bentuk propaganda politik praktis yang akan mengarah pada proses pembusukan intelektual seperti yang sering kita dapati melainkan pendidikan politik yang sesuai secara ilmiah dan bermoral (Hasan, 2016).

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Sulawesi Barat merupakan institusi yang memiliki perhatian terhadap pendidikan politik pada generasi muda sehingga Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat selalu berupaya untuk melakukan penanaman nilai-nilai kearifan dan fatsun politik secara benar melalui dunia pendidikan.

Menindaklanjuti upaya ini, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat melakukan kunjungan ke SMAN 1 Wonomulyo dengan tujuan memberikan pendidikan politik kepada siswa. Hal ini dilakukan karena Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat menyadari benar bahwa siswa harus mulai memahami persoalan-persoalan politik kebangsaan melalui proses pembelajaran yang dialogis dan interaktif. Harapannya, kegiatan pendidikan politik ini dapat diselenggarakan secara berkelanjutan di berbagai sekolah di Sulawesi Barat.

### 1.2 Analisis Situasi Mitra

Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan di SMA 1 Wonomulyo yang merupakan salah satu SMA Negeri yang berada di kawasan Polewali Mandar tepatnya di jalan Gatot Soebroto No.3, Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Sama dengan SMA pada umumnya yang tersebar di seluruh Indonesia, masa pendidikan di SMA Negeri 1 Wonomulyo ditempuh dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ajaran, dimulai dari kelas X (sepuluh) hingga kelas XII (dua belas). Sekolah ini didirikan pada tahun 1989 dan memiliki total siswa 932 orang dengan jumlah guru sebanyak 47 orang. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan memberikan pendidikan dasar politik kepada para siswa SMA agar siswa mampu memahami persoalan-persoalan politik kebangsaan yang terjadi melalui proses pembelajaran yang dialogis dan interaktif.

### 1.3 Permasalahan Mitra

Permasalahan utama mitra yang ditemukan adalah (1) Pemahaman siswa terhadap politik hanya sebatas kegiatan pemilu, meskipun perwujudan politik sebenarnya selalu bisa ditemui dalam skala yang besar hingga skala yang terkecil dengan tingkat variasi kajian yang berbeda antara satu dimensi dengan dimensi lain; (2) Kurangnya pemahaman siswa terkait praktek-praktek politik serta proses pengambilan kebijakan sebagai produk politik; (3) Umumnya, pada kegiatan politik seperti pemilu, siswa terindetifikasi sebagai kelompok pemilih pemula atau yang sudah memiliki hak pilih namun masih terkategori massa mengambang (*floating mass*) sehingga masih rentan terhadap pengaruh praktek *money politics* dan ajakan Golput/tidak memilih.

## METODE

“Politic Goes To School” dimulai pada tanggal 1 Oktober 2022 dan berakhir pada tanggal 15 Desember 2021 di SMAN 1 Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Adapun mekanisme kegiatan dilakukan dalam tiga tahap yaitu (1) Pelaksanaan *Workshop* Literasi Politik pada tanggal 1 Oktober 2022; (2) *Focus Group Discussion* (FGD) pada tanggal 7 November 2022; dan (3) *Sharing Session* pada tanggal 15 Desember 2022.

Tabel 1 Daftar Jadwal dan Materi Kegiatan

No.	Jadwal	Jenis Kegiatan	Materi	Narasumber/ Pelaksana
1.	1 Oktober 2022	Workshop Literasi Politik	<i>Public policy</i>	Hendrawan, S.Sos., M.AP
			Jenis-Jenis Kebijakan Publik	Rezki Rahmawati, M.I.Kom
2.	7 November 2022	<i>Focus Group Discussion (FGD)</i>	<i>Capacity Building</i>	Andi Mappatunru, S.Pd.,M.KP
3.	15 Desember 2022	<i>Sharing Session</i>	Pendidikan politik	Rahmatullah, S.Sos., M.Si

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pemberian materi, diskusi interaktif dan *sharing session* terkait pendidikan politik. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dan pendidikan politik bagi siswa SMAN 1 Wonomulyo. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan siswa SMAN 1 Wonomulyo dapat memiliki pengetahuan serta pemahaman yang baik dan menyeluruh terkait politik.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim dosen dari Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat dengan tema "*Politic goes to School*" dimulai pada tanggal 1 Oktober 2022 dan berakhir pada tanggal 15 Desember 2022 di SMAN 1 Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Adapun mekanisme kegiatan dilakukan dalam tiga tahap, yakni : 1) Pelaksanaan *Workshop* Literasi Politik pada tanggal 1 Oktober 2022; 2) *Focus Group Discussion (FGD)* pada tanggal 7 November 2022; serta 3) *Sharing Session* pada tanggal 15 Desember 2022. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk memberikan pendidikan politik awal kepada siswa SMAN 1 Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, agar siswa dapat melek politik dan mampu menunjukkan partisipasi yang lebih baik dalam politik kedepannya.

#### 3.1 *Workshop* Literasi Politik

Kebijakan publik atau *public policy* sebagai produk politik merupakan sebuah keniscayaan sosial. Meskipun kebijakan publik dirumuskan oleh pemerintah daerah, Bridgman dan Davis dalam bukunya "*The Australian Policy Handbook*" (Davis & Althaus, 1998) menyatakan siklus kebijakan publik (identifikasi isu, analisis kebijakan, konsultasi, koordinasi, keputusan, implementasi, dan evaluasi) wajib melibatkan pihak-pihak lainnya yang berkompeten agar hasilnya tidak merugikan semua pihak. Pendidikan terkait literasi

politik khususnya materi kebijakan publik diberikan pada siswa agar siswa sejak dini menyadari perannya sebagai generasi muda dan belajar untuk mengidentifikasi isu daerahnya yang mendesak dan darurat.



**Gambar 1.** Kegiatan workshop literasi politik dengan materi public policy yang dibawakan oleh Hendrawan, S.Sos., M.Si pada Tanggal 1 Oktober 2022 di Aula SMAN 1 Wonomulyo.



**Gambar 2.** Kegiatan workshop literasi politik dengan materi jenis-jenis kebijakan publik yang dibawakan oleh Rezki Rahmawati, M.I.Kom pada Tanggal 1 Oktober 2022 di Aula SMAN 1 Wonomulyo.

Kebijakan publik sendiri merupakan suatu hal yang esensial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai produk politik, kebijakan publik memberikan dampak luas dan mendalam bagi formasi elite politik dan formasi pendukung dalam suatu sistem politik dan pembangunan. Pemerintah yang baik diharuskan memiliki kemampuan yang memadai agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan lingkungan (Tahir, 2018).

Oleh karena itu, peran kebijakan publik dan perumus kebijakan publik menjadi sangat vital. Dalam proses perumusannya, kebijakan publik harus melibatkan berbagai pihak karena kebijakan publik dibuat sebagai reaksi atas masalah publik yang muncul. Dengan pertimbangan urgensi kebijakan publik, maka sudah sepatutnya generasi muda memiliki pemahaman yang baik terhadap hal ini. Pemahaman akan kebijakan publik diberikan pada siswa agar mereka mulai memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi isu yang *urgent* dan prioritas didaerahnya. Kedepannya, diharapkan siswa dapat tumbuh menjadi aktor lokal yang memiliki keterampilan dan analisa kebijakan publik yang baik, sehingga siswa dapat melibatkan diri dalam perencanaan, perumusan dan implementasi kebijakan yang berkomitmen bagi keberlangsungan daya saing daerahnya.

### 3.2 Focus Group Discussion (FGD) Capacity Building

Sekolah sebagai sebuah institusi formal selalu dituntut untuk menghasilkan SDM yang handal dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut, siswa sebagai komponen penting dalam sekolah juga dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dalam berbagai program, kegiatan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh sekolah. Tak jarang, program, kegiatan dan juga peraturan berubah-ubah sesuai kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pendidikan.

Selayaknya sekolah pada umumnya, SMAN 1 Wonomulyo memiliki berbagai mata pelajaran yang harus diikuti oleh siswa setiap harinya, passing grade nilai yg harus dicapai, tugas yang harus diselesaikan, serta jam sekolah yang panjang, namun hal tersebut belum menjamin lahirnya SDM yang memiliki keterampilan (*skills*), sikap (*attitude*) dan perilaku (*behaviour*) yang baik.

Pembentukan dan pengembangan kapasitas (*capacity building*) merupakan suatu proses yang dilaksanakan pada tiga level/tingkatan, yaitu individu, kelompok dan institusi atau organisasi dan bertujuan untuk menjamin kesinambungan organisasi/institusi melalui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan. Di SMAN 1 Wonomulyo, *Focus Group Discussion* (FGD) terkait *capacity building* dilakukan agar siswa dapat berkembang



dan dapat terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat. Pembangunan kapasitas (*capacity building*) menjadi hal yang mutlak harus berjalan dengan baik. Secara umum, *capacity building* dapat diartikan sebagai proses meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan (skills), sikap (attitude) dan perilaku (behaviour) dari siswa.

**Gambar 3.** Kegiatan *focus group discussion (FGD)* mengenai *capacity building* yang dibawakan oleh Andi Mappatunru, S.Pd., M.KP pada Tanggal 7 November 2022 di Aula SMAN 1 Wonomulyo

Pada kegiatan "*politic Goes to School*", *capacity building* dilaksanakan agar siswa mempunyai kapasitas yang terus berkembang. Dalam *focus group discussion*, siswa diberikan pemahaman terkait aspek-aspek penting seperti kemampuan berkomunikasi, motivasi diri, kemampuan problem solving, kreativitas dan kepemimpinan serta kaitannya dengan politik.

### 3.3 *Sharing Session; Pendidikan Politik*

Tahap ketiga dalam pengabdian masyarakat ini adalah kegiatan *sharing session* pendidikan politik. *Sharing Session* ini menjadi kesempatan bagi siswa untuk memberikan pertanyaan dan mendiskusikan fenomena politik yang selama ini mereka lihat disekitar mereka. Melalui kegiatan ini juga, pemateri memberikan pemahaman politik yang benar dan kepada siswa.



**Gambar 4.** Kegiatan *sharing session* pendidikan politik yang dibawakan oleh Rahmatullah, S.Sos., M.Si pada Tanggal 15 Desember 2022 di Aula SMAN 1 Wonomulyo.

Masyarakat Indonesia kebanyakan menganggap bahwa politik dan pendidikan adalah dua hal dengan kutub yang berbeda. Politik berorientasi kepentingan sedangkan pendidikan justru mengajarkan untuk merangkul semua kepentingan sehingga menjadi seperti tanpa kepentingan, oleh karena itu kedua hal tersebut senantiasa dipisahkan. David Easton dan Jack Dennis dalam bukunya *Children in the Political System* (1969) memberikan



batasan mengenai pendidikan politik yaitu “... *development process which persons acquire aorientation and paterns of behaviour*”. Selanjutnya, Fred I. Greenstain dalam jurnalnya yang berjudul *A Note on the Ambiguity of "Political Socialization": Definitions, Criticisms, and Strategies of Inquiry* (1970) menyatakan bahwa “*Political socialization is all political learning formal and informal, delibrete and unplanned, at every stage of the life cycle inchiding not only explicit political tearning but also nominally nonpolitical learning of political lie relevant social attitudes and the acquisition of politically relevant personality characteristics*”.

Kedua pendapat di atas mengungkapkan bahwa pendidikan politik adalah suatu bentuk pendidikan yang dijalankan secara terencana dan disengaja baik dalam bentuk formal maupun informal yang mencoba untuk mengajarkan kepada setiap individu agar sikap dan perbuatannya dapat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku secara sosial. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa pendidikan politik tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan politik seperti pemilu, namun pendidikan politik juga mencoba untuk mengaitkan sikap dan tingkah laku individu tersebut dengan stabilitas dan eksistensi sistem politik.

Sejak dini generasi muda harus peduli dengan persoalan bangsa khususnya masalah politik. Mereka perlu belajar dan sekaligus memahami berbagai persoalan yang sedang dihadapi bangsa dan negerinya. Sudah saatnya para siswa sebagai generasi muda diajarkan dan dituntun untuk memahami berbagai persoalan yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup rakyat banyak. Sudijono Sastroatmodjo (1995) memberikan komentarnya mengenai hubungan pendidikan dengan tingkat kesadaran politik seseorang sebagai berikut :

“..... Tingkat pendidikan memiliki peranan penting dalam rneningkatkan kesadaran politik. Makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat menjadi makin tinggi kesadaran politiknya. Demikian sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan masyarakat maka makin rendah pula tingkat kesadaran politik masyarakat ...”

Memang dapat dikatakan bahwa berbagai perangkat disekolah antara lain kurikulum, buku-buku teks, metode pengajaran, organisasi-organisasi yang ada di sekolah, lingkungan kelas, siswa, guru, struktur administrasi dan lain-lainnya secara implisit mengajarkan pendidikan politik dan praktek politik sederhana pada siswa, namun pengetahuan akan politik yang utuh serta orientasi politik yang sehat tidak cukup jika hanya diberikan secara implisit mengingat orientasi politik yang terbentuk pada usia tersebut akan berakar sangat kuat dan terus berlanjut sepanjang hayat, terkecuali jika terdapat lingkungan sangat kuat yang mempengaruhi individu tersebut.

Dengan adanya *sharing session* pendidikan politik, siswa mendapatkan ruang untuk mengungkapkan pendapatnya serta berdiskusi terkait praktik-praktik politik yang mereka lihat disekeliling mereka. Dalam kegiatan ini juga siswa didorong untuk memupuk sikap menghargai pendapat orang lain dengan melakukan pemilihan ketua kelas atau diskusi serta debat yang baik tentang permasalahan bangsa hal ini diberikan sebagai bentuk pendidikan politik praktis awal bagi siswa.

## **KESIMPULAN**

Dari Pengabdian Masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa : kemampuan memahami persoalan-persoalan politik yang terjadi bukanlah kemampuan yang datang tiba-tiba. Generasi muda khususnya siswa perlu dilibatkan dalam proses pembelajaran yang dialogis dan interaktif agar memiliki pengetahuan politik yang utuh inilah yang menjadi urgensi pelaksanaan kegiatan “Politik Goes to School : Pendidikan Politik pada Siswa SMAN 1 Wonomulyo”. Kedepannya diharapkan pengabdian masyarakat yang dilakukan dapat memberikan pendidikan politik yang bernilai moral kearifan dan kesantunan politik bagi siswa serta dapat diaplikasikan ke dalam dunia pendidikan.

## **SARAN**

Berdasarkan Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran, diantaranya (1) sekolah diharapkan berupaya untuk memberikan pendidikan politik yang benar kepada siswa. Adanya pendidikan politik secara ilmiah dan bermoral yang diterima siswa akan menghasilkan perilaku politik yang baik. (2) Pendidikan politik membantu siswa memahami politik yang berlaku didaerahnya, oleh karenanya, sekolah disarankan untuk melakukan kerjasama dan melaksanakan pelatihan pendidikan kepada guru-guru agar nantinya dapat menyampaikan politik secara benar.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada LPPM Universitas Sulawesi Barat serta terima kasih kepada pihak SMA Negeri 1 Wonomulyo selaku mitra pengabdian masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Davis, G., & Althaus, C. (1998). *The Australian Policy Handbook*. London: Routledge.
- Easton, D., & Dennis, J. (1969). *Children in the Political System: Origins of Political Legitimacy*. New York: Cambridge University Press.
- Fred, I. G. (1970). A Note on the Ambiguity of "Political Socialization": Definitions, Criticisms, and Strategies of Inquiry. *The Journal of Politics* .
- Halik. (2019). Penerapan Pendidikan Politik bagi Peserta Didik (Suatu Penelitian Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Indra Jaya Pidie). *Jurnal Sains Riset*.
- Hasan, E. S. (2016). The Effects Of Civic Education Learning On Students' Political Literacy In Sma Negeri 2 Purwokerto. *jurnal sosiohumaniora*.
- Izzati, R. E. (2013). *Perkembangan Peserta Didik* . Yogyakarta: UNY Press.
- Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Ilmu Sosial*.
- Sastroatmodjo, S. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Press.



Setiajid. (2011). Orientasi Politik yang Mempengaruhi Orientasi Pemilih Pemula dalam Menggunakan Hak Plihnya pada Pemilihan Wakilota Semarang pada Tahun 2010.

*Integralistik.*

Tahir, A. (2018). *Kebijakan Publik dan Good Governance*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.